

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI YANG TIDAK SAH
(Studi Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm)

Oleh :
Shanti Melya Andini
E1A020265

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apabila syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 7766/Pdt.G/2023/PA.Sgm serta untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut mendasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 25, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, hakim dapat menambahkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini yaitu putusannya perkawinan antara pemohon dan termohon yang menyebabkan putusannya hubungan suami isteri serta status dari pemohon dan termohon kembali seperti semula.

Kata kunci: *Pembatalan Perkawinan, wali tidak sah*

CANCELLATION OF MARRIAGE DUE TO INVALID GUARDIAN
(Case Study of 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm)

By :
SHANTI MELYA ANDINI
EIA020265

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family based on God Almighty. Marriage can be said to be valid if it fulfills the conditions and pillars of marriage. If the conditions and pillars of marriage are not fulfilled, then the marriage can be requested for annulment of marriage.

This study aims to determine the judge's consideration in deciding the case in Decision Number 7766/Pdt.G/2023/PA.Sgm and to find out the legal consequences of marriage annulment in the case. This research uses the Normative Juridical method with prescriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data with data collection methods based on literature studies which are then presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis methods.

The results of the research and discussion show that the legal considerations of the panel of judges in granting marriage annulment in the decision are based on Article 49 of Law Number 7 of 1989, Article 25, Article 23, Article 26 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 and Article 71 letter (e) of the Compilation of Islamic Law. According to researchers, judges can add Article 1 number 1 of Law Number 7 of 1989, Article 14, Article 20, Article 21 paragraph (1), and Article 23 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The legal effect of the annulment of this marriage is the dissolution of the marriage between the applicant and the respondent which causes the breakup of the husband and wife relationship and the status of the applicant and respondent returns to what it was before.

Keywords: *annulment of marriage, illegitimate guardian*